

# PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI

**Rika Ramadhanti**

Universitas Islam Kuantan Singingi

**Abstract:** A political party by Max Weber is a public organization that aims to bring its leader to power and allows his supporters (politicians) to benefit from that support. Weber also argues that the term “political party” will be used to denote a kind of associative social relationship whose membership is based on a formally free contract. The purpose of its activity is to instill a force within a corporate group for its leaders in order to gain an ideal profit or the realization of a certain objective policy or the achievement of personal gain or both. Samuel P Huntington says that democracy is a means of establishing authority while limiting that authority. This means that the authority of the ruler is not absolute, nor the otoritas or kekuasaan still remain control by other authorities.

**Abstrak:** Partai politik menurut Max Weber adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Weber juga berpendapat, “istilah parpol” akan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang asosiatif yang keanggotaannya didasarkan pada pengrekrutan yang secara formal bebas. Tujuan aktivitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuatan dalam suatu kelompok berbaan hukum (corporate) bagi pemimpin-pemimpinnya guna mendapatkan keuntungan ideal atau berupa realisasi kebijakan objektif tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya. Samuel P Huntington mengatakan bahwa demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkan otoritas sekaligus membatasi otoritas tersebut. Artinya otoritas penguasa tidak mutlak, juga otoritas atau kekuasaa masih tetap dkonrol oleh otoritas yang lain.

**Kata Kunci:** partai politik dan demokrasi

## PENDAHULUAN

Partai politik bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi, baiknya partai politik maka akan baik pulalah proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah Negara, dan begitu pula sebaliknya bila partai politik bermasalah maka demokrasi akan pincang proses politiknya. Karena dalam hal ini sebagai pilarnya demokrasi, partai politik memainkan peranan penting sebagai penghubung antara pemerintahan Negara dengan warga negaranya, karena dalam hal ini partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara.

Menurut Mayer dalam Rohaniah (2015) partai politik memiliki posisi sentral dibandingkan organisasi-organisasi politik lainnya disebabkan dua hal sebagai berikut :

1. Hanya partai politik yang dapat menjalankan tugas untuk menciptakan program melalui kompromi yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Kompromi tersebut dicapai setelah mempertemukan pelbagai kepentingan dan

nilai yang berbeda setelah mempertimbangkan tindakan-tindakan masyarakat sipil dan asosiasi-asosiasi yang ada didalam masyarakat. Di satu pihak, dalam penyusunan program partai politik mempertimbangkan kesejahteraan umum untuk mendapatkan dukungan dari pemberi suara. Dipihak lain, banyak kelompok dan organisasi dalam masyarakat yang mengidentifikasi dirinya dengan politik tertentu karena merasa kepentingannya di perjuangkan oleh partai tersebut. Situasi-situasi hubungan partai politik ini mewujudkan gagasan demokrasi tentang integrasi.

2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan, dan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tindakan Negara. Partai politik bisa menjalankan tugas ini karena hanya partai politik yang berakar dalam kehidupan politik masyarakat sipil dan pada saat yang sama menanamkan pengaruh di lembaga-lembaga Negara, parlemen dan pemerintah yang mana program-program politik dan hukum men-

dapatkan keabsahannya. Hanya partai politik yang melaksanakan tuntutan politik masyarakat sesuai dengan statusnya apakah sebagai bagian dari pemerintah atau kekuatan oposisi.

Menurut catatan *Netherlands Institute fo Multiparty Democracy (NIMD)* (dalam Rohaniah, 2015), mengungkapkan paling tidak tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi yakni : *pertama*, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; *kedua*, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan *ketiga*, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi. Demokrasi itu sendiri masih menjadi perdebatan di banyak Negara, pada hakikatnya demokrasi adalah sebuah sistem yang syarat dengan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya. Hal tersebut akan menjadi pijakan Negara untuk menertibkan rakyatnya menuju Negara yang benar-benar merdeka dan tanpa ada kediktatoran, anarkisme dan diskriminatif.

Merujuk pada pendapat Beetham dalam (Muliansyah, 2015), demokrasi yang banyak terjadi hanya menekankan pada dimensi prosedural demokrasi semata-mata pada aspek electoral politik. Sehingga demokrasi seolah-olah hanya ritual semata, yang hanya dilihat pada saat pemilihan umum dan terpilihnya pemimpin-pemimpin publik. Sehingga demokrasi sesungguhnya atau substantive ini dilupakan, padahal dalam demokrasi sesuatu yang berbentuk substansi itu diutamakan. Huntington dalam Muliansyah (2015) mengatakan demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkan otoritas sekaligus membatasi otoritas tersebut. Artinya otoritas penguasa tidak mutlak, juga otoritas atau kekuasaan masih tetap dikontrol oleh otoritas yang lain.

Meskipun secara falsafah bahwa demokrasi tidak semuanya sempurna seperti yang diinginkan banyak pihak, namun begitu dalam perkembangannya demokrasi juga masih banyak Negara yang terus berbenah diri untuk mewujudkan konsep Negara demokrasi yang sesungguhnya. Tentu dengan ditunjang juga dengan adanya perbaikan-perbaikan dari semua

aspek kehidupan masyarakat, sistem sosial, budaya, ekonomi. Sistem pemerintahan, sistem pemilihan umum dan partai politik.

## **METODE**

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah pada penggunaan model penelitian kualitatif-deskriptif. Model penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang menekankan kedekatan dengan data, partisipasi dan pengalaman. Penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen metode dalam penelitian ini adalah mendeskripsi, menganalisa, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsepsi Partai Politik**

Partai politik menurut Weber adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Weber juga berpendapat, “istilah *parpol*” akan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang asosiatif yang keanggotaannya didasarkan pada pengrekrutan yang secara formal bebas. Tujuan aktivitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuatan dalam suatu kelompok berbaan hukum (*corporate*) bagi pemimpin-pemimpinnya guna mendapatkan keuntungan ideal atau berupa realisasi kebijakan objektif tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya.

Menurut Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sementara itu Subakti juga berpendapat partai politik merupakan kelompok yang anggotanya terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan

kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan pelbagai kepentingan yang hidup didalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Apter dalam Rohaniah (2015) partai-partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar menawar, dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik disitu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri diatas pelbagai kepentingan publik yang lebih umum. Jelaslah bahwa sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian yang lain tidak, tetapi semua itu merupakan bagian permainan partai.

Soltau dalam Rohaniah (2015) berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka. Sementara itu Neumann dalam Budiardjo (2008) berpendapat bahwa partai politik organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

### **Peran dan Fungsi Partai Politik**

Menurut Budiardjo (2008), melihat fungsi partai politik setidaknya-tidaknya ada empat macam fungsi; *pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*interest aggregation*) dan sarana perumus kepentingan (*interest articulation*). *Kedua*, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap feno-

mena politik dan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. *Ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus betul-betul mencari sosok yang betul-betul profesional dan orang-orang yang punya integritas. *Keempat*, adalah sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, tentu selalu berbeda, maka akan berpotensi konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya.

Sementara itu Surbakti (1992) berpendapat, terdapat tujuh fungsi partai politik yakni sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi Politik

Yakni proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

#### 2. Sarana Rekrutmen Politik

Dalam hal ini partai politik berfungsi menyeleksi dan memilih seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik dilakukan guna mencari dan merekrut anggota terbaik dari masyarakat untuk dijadikan kader partai politik sebagai bagian dari rotasi dan regenerasi partai politik.

#### 3. Sarana Partisipasi Politik

Partai politik dalam hal ini berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik bagi warga Negara.

#### 4. Sarana Pemandu Kepentingan

Dalam hal ini partai politik berfungsi untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum, kemudian di perjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

#### 5. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarkan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat di terjemahkan kedalam bahasa yang dipahami masyarakat.

#### 6. Sarana Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepepung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

#### 7. Sarana Kontrol Politik.

Partai politik harus melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan demi terciptanya keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideology) yang di jabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu menurut Rich dalam Darmawan (2015), fungsi partai politik terbagi menjadi tujuh diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merekrut dan menominasikan calon yang akan menduduki jabatan politik tertentu.
2. Memobilisasi dukungan terhadap calon-calon yang mereka ajukan untuk ikut dalam sebuah pemilihan umum.
3. Mengelompokkan pilihan isu diantara ke-

lompok calon yang berbeda. Partai politik dalam hal ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan individu dan kelompok masyarakat dan pemerintah.

4. Mempresentasikan kelompok sosial atau kelompok kepentingan yang berbeda. Kelompok sosial atau kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat dapat merujuk kepada ideology dan platform partai politik yang dianggap mendekati kepentingan yang mereka perjuangkan.
5. Menggabungkan kepentingan tertentu ke dalam koalisi yang lebih luas. Sebuah kepentingan tertentu perlu didukung oleh koalisi dan partai politik yang luas agar memperoleh dukungan yang mayoritas.
6. Membentuk dan mempertahankan pemerintahan. Fungsi membentuk dan mempertahankan pemerintah ini adalah salah satu fungsi penting dari praktik politik. Tujuan dibentuknya partai politik itu sendiri adalah untuk dapat mendapatkan, membentuk dan mempertahankan pemerintahan.
7. Mengintegrasikan warga Negara kedalam proses politik. Anggota partai politik di parlemen bertugas memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dari seluruh masyarakat yang diwakilinya. Ketika sebuah keputusan pembuatan kebijakan telah dihasilkan di parlemen, maka partai politik berfungsi mengkomunikasikan hasil proses pembuatan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Kemudian King dalam Rohaniah (2015) peran utama partai politik terbagi menjadi tiga macam yakni :

1. Memberikan jembatan institusional antara warga negara dan pemerintah
2. Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilihan umum
3. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik.

### **Partai Politik dan Demokrasi**

Bagi Negara yang menganut konsep demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar

yang sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan menjadi pijakan bagi Negara untuk menertibkan rakyatnya menuju Negara yang benar-benar merdeka dan tanpa ada kediktatoran. Karna pada hakikatnya partai politik harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihan. Partai politik harus memiliki komitmen dan tetap menjalankan fungsifungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai, sebab jika partai tidak menjalankan peran dan fungsi dengan baik maka partai bersiaplah untuk ditinggalkan pendukung ataupun konstituennya.

Dewasa ini konsep Negara demokrasi hendaknya bukanlah demokrasi yang hanya menjalankan ritual semata, yang hanya dilihat pada saat pemilihan umum dan terpilihnya pemimpin-pemimpin publik. Karena sistem demokrasi tidak hanya sekedar menjalankan pemilihan umum, namun demokrasi itu juga lebih mengutamakan hal-hal yang prinsip dan substansi. Dalam hal inilah partai politik memiliki peranan penting sebagai salah satu pilarnya demokrasi terutama bagi Negara-negara berkembang. Merujuk pada pendapat Macridis dalam Muliansyah (2015) bahwa tidak ada sistem politik berjalan tanpa partai politik, kecuali Negara yang menganut sistem perpolitikan otoriter atau tradisional, dimana raja atau penguasa yang menjalankan kekuasaannya sangat tergantung pada tentara atau polisi.

Partai politik dalam hal ini adalah lembaga politik yang menjadi alat politik dari semua lapisan masyarakat dalam meyarakan aspirasi, mengkader calon-calon pemimpin Negara yang juga menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkan dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Sebab partai-partai politik di Negara demokrasi memiliki tujuan utama yakni memperoleh kekuasaan dengan memenangi pemilihan umum dan mengimplementasikan kebijakan publik mereka se-

telah berkuasa. Untuk kedua tujuan tersebut sangat diperlukan adanya organisasi untuk meraih kekuasaan pemerintah, dan merupakan tulang punggung pemerintahan kesatuan yang dapat menjalankan program kebijakannya.

Namun dewasa ini partai politik yang merupakan salah satu pilarnya demokrasi telah mengalami banyak perubahan, hal ini dipengaruhi salah satunya dengan adanya kemajuan teknologi. Pada saat ini dengan kecanggihan teknologi para petinggi ataupun pemimpin partai dapat secara langsung menyapa para pemilih secara langsung. Hal ini tentu mengurangi perlunya keanggotaan massal dan struktur organisasi yang gemuk. Namun begitu hal ini tentunya juga memiliki sisi negatif dalam upaya mewujudkan sebuah Negara yang demokratis. Ketika partai politik lebih mengutamakan peran media bagi pemimpin partai untuk menyapa para pemilih secara langsung tentunya partai tidak perlu berakar kuat di masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak pada menurunnya partisipasi dan partai akan berubah diri dari partai massa yang kompetitif menjadi partai kartel-kartel yang nantinya akan saling berkolaborasi satu sama lain. Hal ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana masyarakat menyuarakan kepentingannya kepada pemerintah karena partai politik hanya akan berisikan kalangan profesional yang hanya akan membicarakan persoalan politik dan akan lebih mendengarkan pandangan profesional karier ketimbang masyarakat umum.

Merujuk pada pendapat Michel dalam Newton (2016), partai-partai modern telah terperangkap dalam jebakan para politisi karier profesional yang mengelola partai dan menyelenggarakan kampanye pemilihan umum secara sentralistik dan sangat profesional. Sehingga urusan ini hanya meliputi jejak pendapat, membentuk kelompok fokus, memoles berita, kampanye kehumasan dan penggalangan dana yang dirancang secara cermat, teknologi komuter dan penguasaan media massa.

Dinamika ini akan menjadikan segudang persoalan bagi proses demokrasi sebuah Negara. Selaras dengan pendapat Firmanzah (2008) tentang lahir dan berakhirnya suatu partai

politik dapat disebabkan oleh perubahan desain sistem politik yang dianut “penguasa”, sehingga partai politik akan dengan sangat mudah mengontakan merk partai politik atau bendera partai politik serta strategi partai dapat disesuaikan dengan kondisi politik yang berlaku pada setiap perubahan sistem politik.

Kedua ini akan menyebabkan proses demokrasi di sebuah Negara akan sulit untuk diwujudkan karena proses demokrasi itulah yang telah dibajak oleh aktor-aktor politik yang terlibat dalam politik praktis yang tidak bertanggung jawab terhadap falsafah hidup berdemokrasi. Bukankah pada hakikatnya demokrasi adalah milik rakyat dan kebijaksanaan dari rakyat, bukan kehendak pribadi, kelompok kepentingan dan golongan lain. Akan tetapi demokrasi itu merupakan sebuah sistem yang mengedepankan kepentingan rakyat pada umumnya. Demokrasi juga berada pada jalur yang sangat mendasar dalam rangka memberikan jalan kepada kehendak umum untuk memberikan kesempatan dan kesepakatan bagi setiap orang yang melakukannya.

Maka dari itu partai politik dan demokrasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan sebuah Negara yang demokratis partai politik tidak hanya syarat pada kepentingan partai politik saja, akan tetapi partai politik harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihan. Oleh karena itu, partai politik harus punya komitmen dan tetap menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilarnya demokrasi.

## SIMPULAN

Partai politik adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Partai politik harus memiliki komitmen dan tetap men-

jalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai, sebab jika partai tidak menjalankan peran dan fungsi dengan baik, maka partai bersiaplah untuk ditinggalkan pendukung ataupun konstituentnya. Maka dari itu partai politik dan demokrasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan sebuah Negara yang demokratis partai politik tidak hanya syarat pada kepentingan partai politik saja. Akan tetapi partai politik harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihan. Oleh karena itu, partai politik harus punya komitmen dan tetap menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilarnya demokrasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman Ways, Muliandyah, 2012. *Bingkai Demokrasi: Sebuah Refleksi Gelombang Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Arruzz Media
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_, 2001. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darmawan, Ikhsan, 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth, 2016. *Perbandingan Sistem Politik; teori dan Fakta*. Bandung: PT. Nusa Media
- Rohaniah, Yoyoh & Efriza, 2015. *Pengantar Ilmu Politik; Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia
- Ways, Muliandyah A, 2015. *Political; Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*. Yogyakarta: Mata Padi Persindo.